KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Setujui PMN non tunai, BUMN berdayakan aset nganggur jadi produktif
Tanggal : Kamis, 04 Juli 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

DPR Setujui PMN Non Tunai

BUMN Berdayakan Aset Nganggur Jadi Produktif

Senayan menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) nontunai berupa aset kepada 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap perusahaan pelat merah, negara dan masyarakat secara langsung.

USULAN PMN kepada 11 BUMN berupa aset atau Barang Milik Negara (BMN) sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Adapun BUMN penerima PMN nontunai berupa BMN, yaitu PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 1,93 triliun, PT Bio Farma (Persero) sebesar Rp 68 miliar, PT Sejahtera Eka Graha sebesar Rp 1,22 triliun, PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) sebesar Rp 24,12 triliun.

Lalu, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebesar Rp 367,53 miliar, Perum Damri sebesar Rp 460,72 miliar, Perum LPPNPI (Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia) atau Airnav Indonesia (Persero) sebesar Rp 301,89 miliar.

Selanjutnya, PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 4,18 triliun, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN sebesar Rp 828,36 miliar, Perum Perumnas sebesar Rp 1,10 triliun, PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 3,34 triliun.

Sedangkan, PT Len Industri (Persero) berupa konversi utang sebesar Rp 649,22 miliar.

Pengamat dari Institut Teknologi Sumatera (Itera) IB Ilham Malik menilai, pemberian PMN kepada BUMN merupakan kebijakan politik anggaran yang sudah terjadi setiap tahun.

Yang terpenting, kata dia, ada pengawasan dari Pemerintah terkait soal efektivitas pemberian PMN tersebut.

"Kita harus lihat dari sisi perspektif, bahwa negara punya perusahaan bernama BUMN. Lalu, aset negara diberikan kepada BUMN untuk dikelola agar menjadi produktif," ujar Ilham, kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Dengan demikian, lanjutnya, BUMN berkewajiban melakukan pemberdayaan terhadap aset yang dimiliki Pemerintah agar memberikan benefit yang dapat dirasakan oleh negara, BUMN dan masyarakat.

Karena itu, lanjut Ilham, BUMN perlu memberikan gambaran rencana atau *roadmap* dari penggunaan aset tersebut.

"Menjadi tanggung jawab BUMN untuk merancang rencana bisnisnya. Sehingga hasil dari pengelolaan aset baru itu bisa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan perusahaan," katanya.

Dari sisi Pemerintah, diharapkannya, memiliki pertimbangan yang matang dalam memberikan PMN nontunai. Dia berpesan, PMN jangan diberikan ke perusahaan pelat merah yang tidak bisa mengoptimalkan aset yang dimilikinya.

"BUMN yang tak punya kemampuan kelola aset, jangan diberikan. Kalau ditambah aset baru, (pasti) tidak bisa memanfaatkannya," *warning*-nya.

Budi Harto

Pemanfaatan aset, ditekankannya, sangat penting bila ditujukan pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Ini menjadi tugas serta tanggung jawab BUMN untuk meramu pemanfaatan aset tersebut, agar bisa men-*generate* pendapatan di kemudian hari," imbuh Ilham.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P menyampaikan, pihaknya telah melakukan pendalaman atas PMN tunai dan nontunai dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2024.

"Komisi XI DPR menyepakati, rencana Kementerian Keuangan terkait pemberian penyertaan modal negara tunai dan nontunai dari APBN Tahun Anggaran 2024," ujar Dolfie di Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Ia menekankan, pelaksanaan PMN diarahkan sesuai dengan upaya, kebijakan, program dan kinerja pada masing-masing BUMN, sebagaimana terlampir hasil dari kesepakatan.

"BUMN yang mendapatkan PMN tunai dan nontunai yang berasal dari konversi utang, PMN dari Cadangan Pembiayaan Investasi dan PMN yang berasal dari Barang Milik Negara, harus menyampaikan laporan kinerja pemanfaatan PMN per semester," tegasnya.

Menurut Dolfie, Kementerian Keuangan menjamin dan bertanggung jawab, bahwa nilai BMN yang diserahterimakan kepada BUMN sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP), akan disesuaikan kembali berdasarkan penilaian dengan prinsip-prinsip *appraisal* yang sahih dan akuntabel.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada penambahan PMN yang sifatnya nontunai, berasal dari BMN untuk 11 BUMN dan Badan Bank Tanah.

"BMN itu di-inbrengkan dalam bentuk aset kepada BUMN-BUMN," kata Sri saat rapat bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (1/7/2024).

Sebagaimana diketahui, inbreng aset merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mengoptimalkan BMN, melalui pemindahtanganan kepada BUMN.

Di kesempatan berbeda, Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto menambahkan, pihaknya juga mendapat PMN nontunai berupa lahan di Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten sebesar Rp 1,8 triliun. Serta di Plaju, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) sebesar Rp 122 miliar.

Sehingga total PMN nontunai berupa lahan yang akan diperoleh perseroan sebesar Rp 1,93 triliun.

Ia meyakini, PMN nontunai ini akan menciptakan *multiplier effect* yang mampu meningkatkan perekonomian daerah setempat.

Sedangkan bagi perusahaan, manfaat PMN ini adalah meningkatkan kemampuan keuangan perusahaan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan.

"Lalu, manfaat bagi Pemerintah adalah menjadikan *asset idle* menjadi produktif, mengurangi beban pemliharaan, serta memberikan kontribusi fiskal dan pajak," tukas Budi saat rapat dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Selasa (02/07/224).

Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini mengusulkan, PMN nontunai berupa BMN sebesar Rp 4,18 triliun, yang terdiri dari aset jaringan gas (jargas) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Rp 4,17 triliun.

Serta *Refueling Hydrant* di Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) senilai Rp 12,45 miliar.

"Kami terima total hampir Rp 6 triliun, untuk jargas-jargas dan SPBG. Ini sebagian aset DPPU dari Kemenhub (Kementerian Perhubungan) dan sebagian besar dari Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral). Jadi, total kurang lebih Rp 4,18 triliun dan ini semua dalam bentuk nontunai," rinci Emma saat rapat dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (02/07/2024).

Menurutnya, PMN nontunai ini merupakan lanjutan dari PMN nontunai sebelumnya, yang realisasinya mencapai Rp 5,9 triliun. ■ IMA